

BAB II

INDUSTRIALISASI MEDIA MASSA, WARTAWAN PEREMPUAN DI MEDIA MASSA, DAN GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA

Industrialisasi media massa merupakan fenomena kompleks yang telah membentuk lanskap media modern di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara informasi disampaikan dan dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi juga memengaruhi bagaimana isu-isu mengenai gender dipahami dalam lingkup profesional di media massa. Ranah kewartawanan telah dikenal sebagai lingkungan yang didominasi oleh kaum pria, yang menimbulkan tantangan bagi wartawan perempuan karena mereka harus menghadapi persaingan ketat dan tantangan profesional yang khas di dalam lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki. Bagian ini akan mengulas secara umum subjek penelitian, termasuk proses industrialisasi media, kondisi wartawan perempuan di era media baru, dan evolusi serta gerakan feminisme di Indonesia.

2.1 Industrialisasi Media Massa

Media massa merupakan sarana komunikasi yang luas dan kuat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan pandangan kepada khalayak yang luas. Dengan platform seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet, media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mengedukasi masyarakat, serta mempengaruhi budaya populer. Kegiatan pers dan kewartawanan mempunyai relevansi yang kuat dengan perkembangan teknologi publikasi dan informasi. Kemunculan mesin cetak dengan kecepatan tinggi pada

tahun 1800-1900 di Amerika Serikat menandai kemajuan dalam hal publikasi media massa, yaitu dalam produksi surat kabar (Supadiyanto, 2020). Di Indonesia, munculnya pers dan media massa dimulai dari *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC), sebuah perusahaan perdagangan yang beroperasi di wilayah Hindia Belanda pada masa itu. Kehadiran pers memberikan inspirasi kepada para pejabat VOC, yang kemudian tertarik untuk menggunakan media cetak ini untuk keperluan administrasi perusahaan mereka. Dengan menerbitkan berbagai publikasi, VOC berhasil mengatur komunikasi internal dan eksternal, serta memperluas penyebaran informasi mereka di wilayah yang luas.

Seiring kemajuan teknologi yang pesat, pola komunikasi dan penyampaian informasi mulai berkembang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuntutan tersebut berlaku pula pada perusahaan media massa untuk mengikuti arus zaman hingga muncul istilah jurnalisme baru (*new journalism*). Konsep baru ini menuntut kecepatan informasi sehingga lahir rubrik jurnalisme warga (*citizen journalism*). Dengan lahirnya *citizen journalism*, pembaca akan merasa lebih dekat dengan media massa karena selain menjadi konsumen, pembaca juga dapat menjadi seorang wartawan. Evolusi media massa mulai merambah ke penggunaan multimedia melalui internet. Sedangkan di Indonesia, penggunaan internet dalam praktik jurnalisme mulai ada sejak tahun 1998. Hal tersebut membuat banyak perusahaan media massa harus semakin mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga banyak perusahaan media di Indonesia mengalami bangkrut karena sulit bertahan di era gempuran teknologi multimedia (Supadiyanto, 2020).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, bersama dengan transformasi media massa, telah mengarah ke era industrialisasi. Peran media massa tidak hanya terbatas pada menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan karena memungkinkan perusahaan media mencapai keuntungan besar. Industrialisasi ini menciptakan masyarakat yang terfokus pada ekonomi, menghasilkan pekerjaan yang semakin beragam dengan beban kerja yang meningkat. Media massa tidak lagi hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga memiliki tujuan ekonomi untuk mencapai keuntungan maksimal (Arnus, 2014). Industrialisasi media massa, disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, telah memicu munculnya konvergensi media. Konvergensi media ini menggabungkan bentuk-bentuk media massa yang berbeda untuk menciptakan media baru yang terintegrasi (Adiprasetio & Wibowo, 2020).

Meskipun memiliki keunggulan, konvergensi telah membawa konsekuensi terhadap kebebasan praktik media di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu, afiliasi politik pemilik media, peningkatan peran media sosial dan *citizen journalism*, perubahan regulasi kebebasan media, dan perubahan praktik profesi wartawan (Tapsell, 2015). Kondisi seperti ini secara tidak langsung membuka peluang untuk relasi kerja yang eksploitatif dan dapat dianggap sebagai bentuk kapitalisme yang memaksa pekerja media untuk tunduk pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) terkait kondisi kerja di sektor-sektor tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas kesejahteraan pekerja dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebanyak 40,5% pekerja mengungkapkan bahwa mereka

bekerja lebih dari 8 jam per hari dan lebih dari 82,1% pekerja mengakui tidak pernah menerima uang lembur. Selain itu, sekitar 51,2% pekerja mengakui bahwa beban kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah dibuat (Sucipto, 2020). Selain itu, survei yang dilakukan oleh AJI menemukan bahwa 93,81% wartawan mengakui belum mendapatkan upah yang layak, 26,8% wartawan tidak mendapatkan dua hari libur dalam seminggu meskipun mereka telah bekerja lebih dari delapan jam setiap harinya, dan sebagian besar dari mereka juga tidak mendapatkan upah lembur (Manan, 2012).

2.2 Wartawan

Menurut KBBI, seorang wartawan atau jurnalis adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menulis berita, baik dalam media massa cetak maupun elektronik. Sebagai profesi, wartawan harus memiliki kualifikasi tertentu agar dapat dianggap sebagai profesi (Supadiyanto, 2020). Terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh wartawan, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2018 mengenai kompetensi wartawan di Indonesia membaginya menjadi tiga tingkatan yaitu Wartawan Muda, Wartawan Madya, dan Wartawan Utama. Setiap tingkatan memiliki spesifikasi kompetensi mereka dalam menjalankan tugas-tugas kewartawanan. Wartawan Muda adalah individu yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik seperti melaporkan berita secara langsung dari lapangan dan menulis artikel berita. Wartawan Madya adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi kegiatan jurnalistik, seperti menjadi redaktur, koordinator liputan, atau asisten redaktur pelaksana. Sedangkan

Wartawan Utama adalah individu yang memiliki peran dalam mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan, seperti menjadi redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, atau pemimpin redaksi (Dewan Pers, 2018).

Dalam menjalankan tugas di industri media, peran wartawan terus berkembang sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Wartawan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, dan lainnya, dan menggunakan teknologi seperti radio, televisi, dan internet untuk menyebarkan informasi. Mereka dianggap memiliki peran penting dalam menyampaikan berita, serta menjaga nilai dan norma yang ada dalam masyarakat (Yudhapramesti, 2015).

2.2.1 Isu Kesejahteraan Wartawan di Industri Media Massa

Industrialisasi media massa yang membentuk tatanan media baru menyebabkan wartawan bekerja di berbagai platform (*cross-platform*), mengakibatkan peningkatan beban kerja, tekanan, dan risiko keselamatan (Rahayu, dkk., 2021). Dengan keadaan industri media saat ini, terdapat tiga masalah besar yang senantiasa dihadapi oleh wartawan atau jurnalis di Indonesia, yakni sebagai berikut (Akuntono dalam Supadiyanto, 2020):

1. Rendahnya kesejahteraan hidup para wartawan dan jurnalis di Indonesia. Pengertian kesejahteraan bagi wartawan merujuk setidaknya pada '*benefit ekonomi*' sebagai imbalan atas pekerjaannya. Kesejahteraan wartawan itu meliputi: gaji bulanan, tunjangan, asuransi, dan aneka benefit lainnya (AJI, 2012). Hal ini berdasarkan data kesejahteraan karyawan di bidang media yang menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 40% perusahaan media yang

memberikan gaji layak untuk para wartawannya. Hal ini sangat ironis mengingat beban kerja yang cenderung tinggi dan berisiko tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan serta jaminan keselamatan yang didapatkan ketika bertugas (Rustam, 2016).

2. Hambatan berserikat sebagaimana realitas yang ditemukan bahwa banyak perusahaan media yang enggan dengan adanya keberadaan serikat buruh. AJI mencatat bahwa angka perusahaan media yang memiliki serikat tidak lebih dari 20, padahal terdapat lebih dari 1500 perusahaan yang terdaftar di Dewan Pers. Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) menyebut salah satu penyebab mengapa pekerja media enggan berserikat adalah ketakutan terhadap kuasa pemilik dan pemberangusan serikat. Pemilik media punya kuasa yang besar untuk menentukan politik redaksi untuk melayani kepentingan para kroni bisnisnya (Apinino, 2021).
3. Minimnya jaminan keselamatan, keamanan, dan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas kewartawanan. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kekerasan fisik dan digital yang dialami oleh pekerja sepanjang karir kewartawanan mereka. Sebanyak 86% responden wartawan mengalami kekerasan serupa, utamanya disebabkan karena membidangi topik peliputan tertentu yang dinilai menyinggung suatu kelompok tertentu (Wendratama, dkk., 2021)

2.2.2 Budaya Dominasi Gender di Industri Media Massa

Gender pada dasarnya bukanlah sesuatu yang ditentukan secara kodrati atau bawaan sejak lahir. Meskipun secara konseptual sering dikaitkan dengan jenis kelamin, sedangkan secara harfiah gender merujuk pada peran yang dibentuk oleh lingkungan sosial. Istilah gender lebih condong ke arah pemahaman tentang peran-peran sosial dan struktural yang terkait dengan maskulinitas dan feminitas (Wood & Fixmer, 2019). Dalam konteks media massa, representasi perempuan seringkali mencerminkan isu-isu yang menjadi sorotan utama, yang kaitannya dengan dominasi ideologi gender dan menekankan dominasi laki-laki serta penindasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk ideologi gender yang umum adalah patriarkisme, yang meyakini superioritas laki-laki dan pengendalian atas perempuan (Sunarto dkk, 2017).

Dalam praktek manajemen media massa, implementasi ideologi patriarki terlihat dalam proses pengalaman wartawan perempuan yang mengalami maskulinisasi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal dapat dilihat melalui ketidakseimbangan jumlah wartawan laki-laki yang lebih besar dibandingkan dengan wartawan perempuan. Sementara secara vertikal dapat dilihat melalui dominasi jumlah pria dalam posisi manajerial menunjukkan hierarki yang mendukung keberadaan laki-laki lebih banyak daripada perempuan (Sunarto, 2014).

Idealnya pekerja laki-laki dan perempuan di bidang redaksional harus mengemban tugas dan diperlakukan secara sama. Namun pada prakteknya, manajemen memperlakukan pekerja perempuan secara berbeda. Isu liputan yang

dinilai lebih '*seksi*' seperti kriminal dan hukum lebih banyak mempekerjakan wartawan laki-laki karena dengan dalih keamanan dan keselamatan karena dianggap keras dan rawan. Hal tersebut membuat pekerja perempuan sering mendapatkan candaan berkonotasi gender dan perendahan kompetensi dari rekan laki-lakinya (Stellarosa dan Martha, 2019).

2.3 Perkembangan Feminisme di Indonesia

Sejarah evolusi feminisme di Indonesia merupakan hasil dari perjuangan berbagai perempuan pada masa penjajahan, dengan pandangan dan fokus gerakan ini dipengaruhi oleh konteks sosial saat itu. Sasaran utama gerakan feminisme adalah memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai ranah, termasuk tenaga kerja, ekonomi, pendidikan, dan teknologi informasi komunikasi. Seiring berjalannya waktu, fokus gerakan ini berkembang tidak hanya pada isu gender semata, tetapi juga mencakup advokasi hak-hak anak dan kelompok marginal lainnya. Meskipun gerakan feminisme di Indonesia menghadapi hambatan besar akibat budaya patriarki yang kuat dan konservatif, tetapi tetap gigih dalam menentang norma-norma yang menghalangi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, gerakan feminisme terus berupaya mempromosikan perubahan sosial yang lebih inklusif. Secara substansial, feminisme diartikan sebagai gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh aspek kehidupan (Ilaa, 2021). Pandangan feminisme mengidentifikasi dan menentang ketidakadilan gender yang masih ada dalam tatanan masyarakat dan budaya (Aliyah dkk., 2018).

Secara luas, terdapat beberapa aliran pemikiran feminisme yang telah mengalami perkembangan selama beberapa dekade terakhir (Retnani, 2017), yang mencakup:

1. **Feminisme Liberal:** Aliran feminisme liberal berfokus pada usaha mencapai kesetaraan gender melalui reformasi hukum dan kebijakan publik. Mereka yakin bahwa dengan memperbaiki sistem dan institusi yang ada, kesetaraan gender dapat terwujud. Di Indonesia, salah satu contoh kontribusi dari pandangan feminisme liberal adalah desakan untuk mewujudkan kuota 30% perempuan dalam parlemen sebagai langkah menuju keadilan dalam sistem hukum.
2. **Feminisme Radikal:** Aliran ini meyakini bahwa ketidakadilan gender tidak hanya bersumber dari diskriminasi di lembaga publik, tetapi juga di ranah pribadi seperti keluarga dan hubungan individu. Mereka percaya bahwa perlu adanya revolusi sosial untuk mencapai kesetaraan gender. Contohnya, di Indonesia, Undang-Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan langkah dalam menanggulangi masalah ini.
3. **Feminisme Marxis:** Aliran ini menekankan pentingnya kelas sosial dalam perjuangan mencapai kesetaraan gender. Mereka yakin bahwa kapitalisme dan patriarki saling terkait dan harus dihapuskan agar kesetaraan gender tercapai. Di Indonesia, Serikat Buruh Perempuan (SB Perempuan) yang didirikan pada tahun 1991 berfokus pada advokasi upah yang setara, kondisi kerja yang aman, dan melawan pelecehan seksual di tempat kerja.

4. Feminisme Interseksional: Aliran ini menekankan bahwa ketidakadilan gender tidak bisa dipisahkan dari diskriminasi yang berakar pada faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, mereka menganjurkan pendekatan yang memperhitungkan interseksi antara berbagai bentuk diskriminasi ini dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Gerakan feminisme di Indonesia dimulai ketika Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh perempuan terkemuka di Jawa pada masa kolonial Belanda, mengungkapkan pandangannya tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender melalui serangkaian surat pada tahun 1912. Kartini menjadi pendorong bagi gerakan feminisme di Indonesia dengan mengadvokasi perubahan sosial yang melibatkan perempuan. Meskipun demikian, catatan awal perjuangan perempuan secara resmi terjadi pada tahun 1928 dengan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928. Sebagai hasilnya, tanggal 22 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu untuk memperingati perjuangan tersebut. Dengan partisipasi perempuan dalam perkembangan sejarah Indonesia, terdapat beberapa bagian pergerakan feminisme di Indonesia dari masa kolonial hingga reformasi (Sa'diyah dkk., 2023),

2.3.1 Kolonial Belanda

Pada era sebelum kemerdekaan, terutama di abad ke-19, perempuan aktif terlibat dalam perjuangan melawan penjajah, didorong oleh kesadaran akan pentingnya meraih keadilan karena merasa belum mendapatkan hak-hak yang

setara dengan laki-laki. Perempuan turut serta dalam berbagai bidang, termasuk dalam perang melawan penjajah. Tokoh-tokoh pejuang perempuan Indonesia pada masa tersebut antara lain Christina Marta Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Dewi Sartika, serta Nyi Ageng Serang. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi perempuan, yang mencapai puncaknya pada Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928. Kongres ini kemudian melahirkan federasi organisasi perempuan yang disebut Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) pada tahun 1928, yang berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII) pada tahun 1929 (Burhanuddin, 2002).

2.3.2 Pendudukan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang pada abad ke-21, studi tentang perempuan semakin berkembang, baik oleh pakar ilmu sosial di dalam maupun di luar akademisi. Awal peran perempuan dapat ditelusuri kembali ke naskah-naskah kuno, seperti "Nagari Ratu" dari Jepang kuno, yang mengungkapkan bahwa pada masa itu banyak negara kecil yang dipimpin oleh perempuan. Selama pendudukan Jepang, perempuan memiliki posisi yang relatif tinggi dalam masyarakat, menikmati kebebasan hidup yang lebih besar dan memiliki akses yang luas terhadap literatur. Peran perempuan di Indonesia selama masa pendudukan Jepang dimulai dengan adanya propaganda "3A" yang bertujuan untuk memperoleh simpati dari perempuan yang merupakan istri dari para pejuang yang terlibat dalam gerakan ini. Selain itu, terdapat gerakan perempuan yang melakukan penyusupan melalui PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), di mana perempuan bertugas untuk memperhatikan kepentingan sesama perempuan serta

menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh perempuan selama masa penjajahan (Fauzia, 2022).

2.3.3 Masa Kemerdekaan

Tidak lama setelah mengumumkan deklarasi kemerdekaan, Indonesia kembali dihadapkan pada kedatangan tentara sekutu yang ditumpangi Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Konflik bersenjata pun kembali terjadi, sebagai respon terhadap situasi tersebut muncul organisasi perempuan yang dikenal sebagai Wanita Republik Indonesia (WANI). Tugas utama WANI adalah memberikan perlindungan kepada korban kebakaran yang tempat tinggalnya diserang dan dibakar oleh pasukan NICA (Fauzia, 2022).

2.3.4 Orde Lama

Era pasca kemerdekaan perempuan Indonesia memperoleh hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1955 dan diberi kesempatan untuk menjadi anggota parlemen. Meskipun demikian, perempuan Indonesia masih harus berjuang untuk hak-hak mereka terkait dengan praktek poligami yang dirasa merugikan. Salah satu isu yang memicu permasalahan terkait poligami adalah keputusan Soekarno yang menikahi Hartini meskipun sudah memiliki istri, Fatmawati. Tindakan poligami ini ditentang oleh organisasi perempuan seperti Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Gerakan Perwani mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, yang menghasilkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang bertujuan untuk mencegah poligami dengan mengatur agar pegawai negeri yang mendukung perempuan tidak memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap pegawai laki-laki yang ingin melakukan poligami. Pada

periode ini, juga terbentuk Kementerian Muda Urusan Peranan Perempuan di dalam Kabinet Pembangunan pada tahun 1974, yang kemudian berkembang menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Muqoyyidin, 2013),

2.3.5 Orde Baru

Pada masa ini terdapat gerakan perjuangan perempuan yang menampilkan gagasan politis oleh Gerakan Perempuan Indonesia (GERWANI). Namun, GERWANI dianggap sebagai organisasi yang dilarang dan dihubungkan dengan gerakan komunis. Akibatnya, perkembangan gerakan perempuan di Indonesia mengalami penurunan. Mayoritas masyarakat kembali pada konsep bahwa perempuan seharusnya hanya berada dalam ranah domestik dan menjadi pendamping setia suami. Meskipun demikian, ada beberapa organisasi seperti Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) yang kemudian digabungkan ke dalam Partai Golkar, sehingga muncul organisasi-organisasi besar pemerintahan seperti Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK (Fauzia, 2022).

2.3.6 Era Reformasi

Orde Baru runtuh setelah menduduki pemerintahan Indonesia selama 32 tahun, hal itu dianggap sebagai kabar baik bagi seluruh rakyat. Kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan beraktivitas kembali terbuka, sejalan dengan semangat demokrasi yang terus digaungkan oleh masyarakat. Era reformasi menandai bangkitnya kembali berbagai organisasi, termasuk organisasi perempuan. Dalam periode reformasi, perjuangan perempuan semakin tampak dengan partisipasinya dalam pembuatan instrumen hukum penting yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan hak perempuan, terutama dalam bidang politik.

Salah satu langkah penting adalah pengesahan UU No.12 Tahun 2003 Pasal 65, yang mengamankan alokasi kursi perempuan sebanyak 30% di parlemen (Natalis, 2020).

2.4 Gerakan Feminisme dalam Industri Media Massa

Permasalahan gender dalam industri media masih menjadi sorotan utama bagi para pejuang feminis. Kehadiran budaya kerja yang didominasi oleh karakteristik maskulin membuat pekerja perempuan menjauh dari aspek feminitas saat berada di lingkungan media. Pola kerja yang cenderung maskulin ini menuntut para pekerja perempuan untuk menampilkan sifat-sifat yang dianggap sebagai atribut khas maskulinitas, seperti keberanian, kemandirian, rasionalitas, kesempurnaan, tanggung jawab, dan kemampuan kepemimpinan. Selain itu, wartawan perempuan juga dituntut untuk dapat membuat keputusan dengan cepat dan rasional menghadapi situasi yang muncul, sehingga kepemimpinan dalam diri pekerja wanita terpacu melihat kondisi kerja yang lebih banyak memberi kesempatan kepada pekerja pria untuk dalam struktur hirarkis organisasi. Namun demikian, mencapai posisi kepemimpinan tidaklah mudah karena sebagian sifat tersebut masih diasosiasikan dengan stereotip laki-laki (Sunarto dkk., 2020)

Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh pekerja perempuan di industri media, tidak mengherankan jika dalam ranah jurnalistik muncul gerakan feminis yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dalam industri tersebut. Gerakan ini sering kali dilakukan di bawah naungan organisasi yang mendukung wartawan seperti AJI yang tidak hanya

memperhatikan kesejahteraan wartawan dan kebebasan pers, tetapi juga mengangkat isu-isu gender dan perempuan. Selain itu, terdapat organisasi wartawan yang khusus mendukung pekerja perempuan, seperti FJPI yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi wartawan perempuan dalam pengembangan karir di media melalui program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam industri media.

Sementara itu, gerakan feminis di era modern terus berkembang sejalan dengan berbagai perdebatan mengenai isu-isu gender yang dihadapi oleh perempuan. Saat ini, media online semakin menjadi platform penting yang mengangkat berbagai isu, termasuk isu-isu yang relevan dengan perempuan dan minoritas. Media seperti *Konde.co*, *Jurnal Perempuan*, dan *Magdalene.co* adalah contoh media yang menitikberatkan pemberitaannya dengan perspektif perempuan dan minoritas.